

Patologi Birokrasi dalam Sinkronisasi Data Stunting di Kabupaten Jombang

Nieke Rudyanty Winanda¹⁾, Nanditya Putri Destyananda²⁾, Priyono Utomo³⁾

¹⁾ Universitas Darul 'Ulum Jombang, Indonesia

²⁾ Universitas Darul 'Ulum Jombang, Indonesia

³⁾ Universitas Darul 'Ulum Jombang, Indonesia

e-mail : nieke.rudyanty@gmail.com¹⁾, nandityaputrid@mail.com²⁾, priyoutm@mail.com³⁾

Received: 04-05-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 21-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Bureaucratic Pathology, Synchronization, Stunting*

Inconsistent stunting data is one of the factors hindering stunting reduction in Jombang Regency. One of the problems with data synchronization is bureaucratic pathology. The purpose of this study was to identify the challenges in synchronizing stunting data in Jombang Regency. This research uses Max Weber's theory of ideal bureaucracy as well as theories about bureaucratic pathology. The method used in this research is qualitative with primary and secondary data sources. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation, with data analysis methods using the Miles and Huberman model. The results of this study indicate a bureaucratic pathology in the synchronization of stunting data in Jombang Regency. The most fundamental is the lack of uniformity in the use of stunting data collection applications, resulting in data held by each Regional Apparatus Organization. This unsynchronized stunting data is one of the obstacles to accelerating stunting reduction in Jombang Regency. This, of course, constitutes a bureaucratic pathology in the synchronization of stunting data. If this bureaucratic pathology can be minimized, it will reduce obstacles to synchronizing stunting data in Jombang Regency.

Abstrak

Kata Kunci: *Patologi Birokrasi, Sinkronisasi, Stunting*

Ketidaksesuaian data stunting merupakan salah satu faktor penghambat dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Jombang. Salah dari sekian permasalahan yang terjadi dalam sinkronisasi data tersebut disebabkan oleh patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini menggunakan teori birokrasi ideal dari Max Weber serta teori tentang patologi birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya patologi birokrasi dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Yang paling mendasar adalah kurangnya keseragaman penggunaan aplikasi pendataan stunting sehingga menyebabkan data yang dimiliki oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah menjadi berbeda. Data-data stunting yang tidak sinkron tersebut menjadi salah satu hambatan dalam percepatan penurunan angka stunting di kabupaten Jombang. Hal ini tentunya menjadi patologi birokrasi dalam sinkronisasi data stunting tersebut. Patologi birokrasi tersebut apabila dapat diminimalisir maka akan dapat mengurangi hambatan dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang.

A. PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan yang dewasa ini mendesak untuk segera diselesaikan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang akibat kekurangan gizi ini merupakan permasalahan yang belakangan banyak terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang menuntut untuk segera ditangani sehingga dampak negatif yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dapat diminimalisir. Tingginya angka stunting pada balita di Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang menargetkan penurunan sebesar 14%.¹ Hal ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan terkait stunting ini hingga menjadi agenda nasional. Pada tahun 2017, WHO menyebut prevalensi stunting balita di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Laos yakni sebesar 43,8%.² Melihat tingginya kasus stunting di Indonesia, pemerintah membuat berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai upaya tersebut antara lain, sosialisasi terkait stunting hingga pemberian makanan bergizi bagi balita. Ada pula bimbingan psikologis kepada calon pengantin dalam rangka persiapan kehamilan dan kelahiran.

Namun begitu, permasalahan stunting di Indonesia belum dapat diatasi secara maksimal. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan subjek utama permasalahan tersebut yakni balita dan ibu semata. Permasalahan stunting juga terkait dengan pendataan jumlah kasus yang ada. Seringkali masalah pendataan jumlah kasus stunting ini menghambat percepatan penanganan stunting. Adanya masalah dalam pendataan stunting ini menjadi satu permasalahan yang juga mendesak untuk diselesaikan. Stunting merupakan suatu kondisi dimana anak memiliki tinggi badan yang kurang jika dibanding dengan anak-anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang sehingga menghambat pertumbuhan anak. Adapun efek buruk dalam jangka pendek yang ditimbulkan oleh stunting ini antara lain gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme tubuh, sedangkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan imun tubuh, dan risiko tinggi terjadinya penyakit kronis di masa tua.³ Terkait dengan masalah pendataan stunting,

¹stunting.go.id. (2024). TP2S - Tim Percepatan Penurunan Stunting.

² Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229.

³ Pratiwi, R. (2021). Dampak Status Gizi Pendek (Stunting) Terhadap Prestasi Belajar. *NURSING UPDATE : Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871, 12(2), 11–23. <https://doi.org/10.36089/nu.v12i2.317>.

sinkronisasi data menjadi satu hal penting dalam penurunan prevalensi stunting. Berbagai masalah terjadi dalam proses sinkronisasi data stunting. Artinya, stunting bukan hanya permasalahan kesehatan dan kurang gizi semata, namun lebih dari itu stunting juga mencakup masalah-masalah sosial lainnya. Masalah lain tersebut misalnya masalah birokrasi, administrasi hingga kebijakan.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pendataan kasus stunting ini misalnya seringkali ibu sulit menerima ketika anak atau balitanya masuk ke dalam kategori stunting. Di samping itu, anggapan bahwa stunting merupakan faktor keturunan membuat masyarakat dan para orang tua pasrah dan pasif menghadapi kondisi tersebut.⁴ Selain itu, ada juga masalah terkait sinkronisasi data stunting. Sinkronisasi data tersebut seringkali menghambat percepatan penanganan stunting. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyebut bahwa data stunting yang terbaru masih harus menunggu sinkronisasi antara penghitungan di tingkat posyandu dan Survei Kesehatan Indonesia.⁵ Mengingat urgensi penanganan masalah stunting ini, selain program-program dan kebijakan yang menasar ibu-ibu, calon pengantin dan balita, sinkronisasi data menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanganan masalah stunting ini. Sinkronisasi data ini akan memegang peranan penting dalam penanganan permasalahan stunting karena data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan akan sangat membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila terdapat data yang tidak sinkron maka akan dapat menyebabkan hambatan dalam penyelesaiannya.

Percepatan penanganan stunting diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tim percepatan penurunan stunting terintegrasi mulai tingkat desa hingga kabupaten. Ini artinya bahwa pada tim-tim di tiap tingkatan, data yang ada harus sinkron. Kabupaten Jombang sendiri merupakan kabupaten dengan tingkat stunting yang tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebut bahwa kasus stunting di Jombang mencapai 22,1% yang berarti bahwa satu dari lima balita mengalami stunting.⁶ Sedangkan menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, prevalensi stunting di Kabupaten Jombang mencapai 5,88% pada Februari 2024 yang berarti

⁴ Indanah, I., Jauhar, M., Kartikasari, F., & Kusumawardani, L. H. (2024). Pelatihan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Keterampilan Deteksi Dini Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.33658/jl.v20i1.341>.

⁵ Prameswari, L. B. (2024). Kepala BKKBN sebut data stunting terbaru masih menunggu sinkronisasi.

⁶ Kominfo.jatimprov.go.id. (2023, November 24). Komitmen Atasi Stunting, Jombang Gelar Jambore 1000 Tim Pendamping Keluarga- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

perlu upaya lebih dalam menurunkan prevalensi tersebut.⁷ Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puji Umbaran, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 3000 balita di kabupaten Jombang mengalami stunting yang terdiri dari kasus lama dan baru dan terus mengalami peningkatan di beberapa kecamatan.⁸

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Jombang. Namun upaya-upaya tersebut akan berjalan optimal apabila diimbangi dengan pendataan yang tepat. Pendataan yang tepat akan mempermudah upaya penurunan prevalensi stunting khususnya di kabupaten Jombang. Pendataan yang tepat juga akan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap tertib administratif khususnya bagi dinas-dinas yang terkait baik secara langsung maupun tak langsung. Pendataan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah sinkronisasi data. Fakta menyebut bahwa selama ini data stunting yang ada memang belum sinkron. Di mana selama ini manajemen data pencegahan stunting belum optimal karena terbatasnya data stunting yang tersedia, kualitas data yang meragukan serta data dihasilkan lebih dari satu instansi.⁹ Kenyataan ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data menjadi kendala dalam penyelesaian permasalahan stunting. Kendala terkait sinkronisasi data dalam pencegahan dan penurunan prevalensi stunting hendaknya dapat diminimalisir agar upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara optimal. Dalam hal ini, upaya pemerintah setempat dalam percepatan penurunan stunting telah diatur dalam Perbup Jombang No. 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang. Hal ini berarti seharusnya data yang didapat mulai tingkat desa hingga kabupaten harus sinkron.

Namun begitu, optimalisasi upaya dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Jombang melalui sinkronisasi data harus terus dilakukan. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi pendataan stunting yang tidak sinkron. Sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang upaya pemerintah dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Permasalahan terkait unsynchronous data stunting di Kabupaten Jombang ini tentunya bukanlah sekadar hal-hal teknis semata. Ada kemungkinan-kemungkinan lain yang layak untuk

⁷ Abay, U. (2024). Gandeng Kementan, Kabupaten Jombang Cegah Stunting Lewat Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Susu.

⁸ Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024). Analisis Tipe Ideal Birokrasi Dengan Konsep Birokrasi Weber di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Analisis Tipe Ideal Birokrasi*, 2(4), 82–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11105597>.

⁹ gerdupapak.com. (2023, June 16). Pemkab Jombang Melalui BAPPEDA Terus Berinovasi dalam Menekan Angka Stunting|.

dikaji lebih mendalam, misalnya hal-hal yang terkait administrasi ataupun birokrasi. Agaknya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa ada unsur patologi birokrasi yang terjadi. Patologi-patologi birokrasi ini juga turut berkontribusi dalam menghambat sinkronisasi data stunting di kabupaten Jombang. Patologi birokrasi tersebut antara lain, adanya pemilihan kader stunting yang tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Selain itu ada juga rasa enggan para kader untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi digital yang sedianya diperuntukkan bagi mereka. Tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya patologi-patologi birokrasi yang lain yang terjadi dalam sinkronisasi data stunting di kabupaten Jombang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sinkronisasi data diharapkan dapat mempermudah proses sinkronisasi data stunting sehingga percepatan penurunan stunting akan semakin mudah pula untuk dilaksanakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan-informan yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu juga diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi berupa pencatatan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian yang ada di masyarakat. Di samping data primer, digunakan juga data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan-informan yang terkait, diantaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, seksi pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang, satgas stunting provinsi yang ditugaskan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, koordinator penyuluh KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, kader stunting Kabupaten Jombang. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap data-data serta proses pendataan terkait stunting. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat data-data yang didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan atau verifikasi data.¹⁰

¹⁰ Miles, H. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jombang merupakan daerah dengan kasus stunting yang tergolong tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.441 kasus stunting dan hingga bulan Februari 2024 sebesar 3.975. Data tersebut didapat pendataan pada bulan timbang Agustus dan Februari yang dilakukan oleh 34 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Jombang. Fakta tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus stunting yang signifikan. Jika disajikan melalui tabel, data jumlah kasus stunting per kecamatan di Kabupaten Jombang tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.

Tren Stunting Tiap Kecamatan Tahun 2021-2023

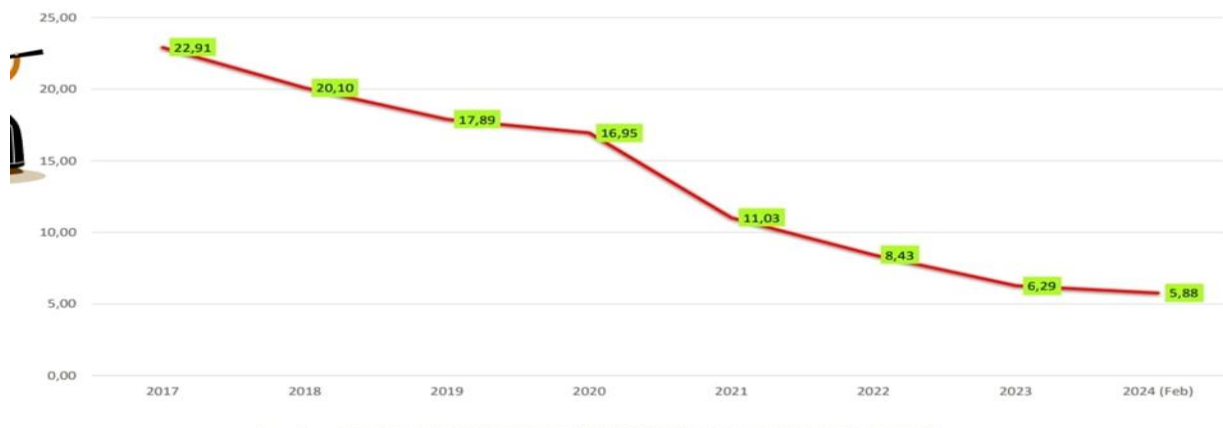
Kecamatan	Jumlah		
	2021	2022	2023
Ploso	42	142	302
Sumobito	83	318	408
Mojoagung	237	205	355
Plandaan	521	480	284
Diwek	164	392	372
Jombang	245	309	195
Perak	248	245	139
Gudo	8	40	235
Ngoro	290	549	353
Mojowarno	462	631	214
Megaluh	666	189	99
Bareng	316	173	195
Kesamben	634	272	197
Kabuh	165	186	96
Bandar Kedung Mulyo	279	220	167
Kudu	502	254	138
Tembelang	149	119	219
Peterongan	15	31	210
Jogoroto	359	335	67
Ngusikan	253	174	22
Wonosalam	306	245	108

Sumber: DPPKBPPPA Kab. Jombang

Data di atas menunjukkan adanya selisih jumlah kasus stunting di tahun 2023. Selisih jumlah tersebut didapat dari pendataan yang dilakukan oleh 34 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Jombang dengan data dari DPPKBPPPA Kabupaten Jombang. Berdasarkan sajian data di atas, dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Jombang menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pula dalam gambar 1.

Gambar 1.

Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang



Sumber: DPPKBPPPA Kab. Jombang

Jika dilihat dari data-data yang ada, prevalensi stunting di Kabupaten Jombang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan prevalensi stunting tersebut dapat dikatakan signifikan. Ini berarti bahwa program percepatan penurunan stunting di kabupaten Jombang berjalan dengan baik. Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Jombang secara signifikan juga merupakan salah satu indikator bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan stunting ini. Percepatan penurunan stunting di kabupaten Jombang sejatinya telah berjalan dengan baik walaupun masih mengalami berbagai macam kendala. Namun jika dilihat dari data yang dirilis oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, agaknya upaya pemerintah dapat dikatakan membuahkan hasil.

C.1 Pendataan Stunting di Kabupaten Jombang

Di Kabupaten Jombang, jika dilihat dari penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki peranan yang penting dalam permasalahan ini. Namun begitu kendala dalam proses percepatan penanganan stunting masih saja terjadi. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah permasalahan sinkronisasi data stunting. Seringkali data stunting yang didapat berbeda-beda antara sumber satu

dengan sumber yang lain. Padahal sumber data tersebut berasal dari dinas-dinas atau pihak-pihak yang memiliki peran dalam percepatan penanganan stunting.

Dalam melakukan pendataan stunting, setiap dinas terkait memiliki aplikasi dan program masing-masing. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan proses pendataan stunting. Seperti yang dilakukan oleh DPPKBPPPA yang menggunakan aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission) dalam melakukan pendataan stunting. Aplikasi tersebut dibuat oleh KOMINFO dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Data dari aplikasi ini diklaim lebih transparan namun saat ini aplikasi JOSS belum dapat digunakan secara maksimal karena tidak semua orang mengerti dan memahami dalam menggunakan aplikasi tersebut. Setiap kader stunting seharusnya mau dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Namun pada kenyataannya tidak semua kader mau dan mampu mengoperasikan aplikasi JOSS ini sehingga aplikasi tersebut hanya dioperasikan oleh ahli gizi. Hal ini membuat proses input data memakan waktu yang lama karena harus menunggu data-data dari tiap Posyandu.

Selain aplikasi JOSS, pemerintah juga meluncurkan aplikasi VERVAL. Di mana VERVAL merupakan kepanjangan dari verifikasi dan validasi data. Dalam aplikasi ini, data yang diinput mencakup PUS (Pasangan Usia Subur), ibu hamil, calon pengantin, peserta KB serta keadaan kelayakan rumah dan jumlah anak. Aplikasi ini dioperasikan oleh kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang telah diberi pelatihan hingga benar-benar menguasai pengoperasiannya serta dibantu oleh penyuluh KB. Aplikasi VERVAL merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yakni PK. Dalam aplikasi PK masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya proses lebih lanjut yang dilakukan pemerintah. Aplikasi ini hanya mendata keluarga beresiko stunting saja tanpa ada tindak lanjut. Data tersebut hanya menjadi hasil rekapitulasi yang menunjukkan jumlah kasus stunting saja. Oleh karena itu di tahun 2024, aplikasi PK ini digantikan dengan aplikasi baru yang bernama VERVAL tersebut.

Pendataan stunting di Kabupaten Jombang telah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanfaatan aplikasi digital dalam proses pendataannya. Proses pendataan stunting di Kabupaten Jombang ini telah dilakukan seluruh elemen yang terkait mulai dari tingkat paling bawah hingga keatas. Fakta ini menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pendataan ini sudah terintegrasi melalui aplikasi digital walaupun pada kenyataannya masih ditemui kendala-kendala dan hambatan terkait proses pendataan tersebut.

C.2 Patologi Birokrasi dalam Sinkronisasi Data Stunting di Kabupaten Jombang

Salah satu kendala dalam percepatan penanganan stunting di Kabupaten Jombang adalah sinkronisasi data. Data kuantitatif yang diterima dari satu sumber seringkali berbeda dengan sumber lainnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab percepatan penanganan stunting menjadi terhambat. Oleh karena itu, sinkronisasi data diperlukan dalam percepatan penanganan stunting untuk mempermudah akses informasi yang seragam terkait permasalahan tersebut. Beberapa manfaat sinkronisasi data, antara lain peningkatan ketersediaan, reliabilitas, dan efisiensi data serta menjadi fasilitator dalam integrasi dan kolaborasi antara sistem yang berbeda.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data memiliki manfaat yang dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan apabila data yang digunakan telah tersinkronisasi dengan baik. Selain itu, sinkronisasi data akan memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam mengakses data yang diperlukan. Karena dengan data yang tersinkronisasi akan didapatkan informasi yang lebih akurat sehingga lebih mudah dalam melakukan pemetaan terkait permasalahan tersebut. Hal ini akan mempermudah pengambilan keputusan bagi dinas-dinas terkait dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Namun pada kenyataannya, selama ini di Kabupaten Jombang, data stunting yang ada belum tersinkronisasi dengan baik antara satu sumber dan sumber lainnya. Data yang didapat berbeda-beda antara satu dinas dengan dinas lainnya. Hal ini menyebabkan rendahnya akurasi data yang diperoleh sehingga menyebabkan terhambatnya proses percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang. Fakta tersebut tentunya tidak sesuai dengan gagasan terkait birokrasi ideal menurut Weber. Di mana gagasan Weber terkait tipe birokrasi ideal yaitu, (1) terdapat pembagian kerja secara jelas; (2) adanya hirarki yang di dalamnya terdapat jenjang pangkat yang jelas mengatur tentang atasan dan bawahan; (3) aturan resmi tentang hubungan antar anggota lembaga; (4) tidak ada hubungan kekerabatan dalam hubungan kerja; (5) penempatan pegawai atas dasar kompetensi yang dimiliki; (6) kesempatan jenjang karir bagi setiap pegawai; serta (7) memisahkan antara kehidupan pribadi dan organisasi.¹² Dalam hal ini, pada aspek aturan

¹¹ Nowo, C. R. H., & Saian, P. O. N. (2024). Evaluasi Kinerja Non-Cryptographic Hash Functions (NCHFs) dalam Sinkronisasi Data pada DBMS Oracle dan Postgres. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(4), 1842–1854. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i4.5531>.

¹² Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024). Analisis Tipe Ideal Birokrasi Dengan Konsep Birokrasi Weber di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Analisis Tipe Ideal Birokrasi*, 2(4), 82–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11105597>.

resmi tentang hubungan antar anggota lembaga belum sepenuhnya dilaksanakan. Kenyataan tersebut terlihat dari adanya berbagai aplikasi yang digunakan oleh masing-masing lembaga terkait pendataan stunting sehingga data kuantitatif yang diperoleh juga beragam. Disamping itu, masing-masing aplikasi yang menghasilkan data berbeda-beda mengklaim bahwa yang disajikan merupakan data yang valid. Hal ini menyebabkan adanya unsynchronous data stunting di Kabupaten Jombang. Selain itu, adanya faktor enggan menggunakan aplikasi pendataan stunting yang berakibat pada pelimpahan tugas-tugas kepada pihak-pihak tertentu juga merupakan salah satu indikator bahwa hubungan profesional antar anggota lembaga belum sepenuhnya terbangun.

Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang, tim percepatan stunting terdiri dari anggota-anggota mulai dari tingkat paling bawah hingga ke atas. Dilihat dari kenyataan tersebut, bisa dipastikan bahwa elemen-elemen yang terlibat sangat banyak. Dengan struktur organisasi yang gemuk seperti ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi atau tim tersebut akan bergerak lamban. Selain itu, adanya hirarki yang akan membuat prosedur birokrasi semakin berbelit-belit. Dan tentu saja hubungan profesional antar anggota lembaga akan mengalami hambatan.

Pada aspek pembagian kerja yang jelas dan terperinci, juga didapatkan fakta bahwa bagian ini tidak dilaksanakan dengan maksimal. Ini terlihat dari aplikasi JOSS yang sedianya diperuntukkan bagi kader stunting namun pada kenyataannya, tidak semua kader mau dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan proses input data harus menunggu waktu yang lama karena harus menunggu data dari tiap-tiap Posyandu terkumpul. Adanya faktor enggan melaksanakan tugasnya secara maksimal, seperti halnya yang terjadi pada para kader stunting di tingkat Posyandu tersebut menyebabkan pembagian tugas yang sebenarnya sudah dilakukan dengan jelas menjadi kacau dan ada indikasi saling lempar tanggung jawab. Fakta tersebut juga menjadi kendala serta hambatan dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang.

Dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang, elemen yang terlibat cukup banyak. Beberapa OPD terlibat dalam program ini. Namun semakin banyak yang terlibat, semakin mengaburkan pembagian dan spesifikasi tugas. Artinya, di antara OPD tidak ada pembagian tugas yang jelas. Hal ini disebabkan oleh masing-masing OPD yang mempunyai tupoksi yang serupa dan serumpun sehingga seringkali membuat tugas-tugas yang harus dilaksanakan menjadi tumpang tindih. Bukan hanya itu, seringkali jika

terjadi permasalahan atau situasi yang kurang sesuai dengan perencanaan, akan saling lempar tanggung jawab antar OPD.

Secara hirarki dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi ini telah memenuhi aspek tersebut. Secara aturan, pendataan stunting di Kabupaten Jombang telah dilakukan mulai tingkat bawah yakni kader-kader Posyandu hingga tingkat pusat. Namun faktanya, masih banyak kader-kader Posyandu yang tidak mau dan tidak mampu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga menghambat proses percepatan penanganan stunting di Kabupaten Jombang. Ini jelas menunjukkan bahwa fakta tersebut mengaburkan hirarki dalam pendataan maupun pelaporan data stunting yang mana pada akhirnya menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas bagian tugas sekaligus pekerjaan masing-masing. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa saling lempar dan menyalahkan terkait sinkronisasi data stunting tersebut.

Adanya indikator hirarki yang kabur ini, yang membuat alur pelaporan dan tanggung jawab menjadi tidak jelas, menyebabkan hambatan dalam sinkronisasi data stunting. Pemerintah sebenarnya bisa membuat alternatif solusi dengan memotong hirarki dalam masalah pendataan stunting ini sehingga struktur birokrasi menjadi lebih ramping guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi yang menjadi tujuan birokrasi. Jika dilihat dari banyaknya elemen-elemen yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang. Maka tidak berlebihan jika disebut bahwa hal ini juga memberikan kontribusi dalam pengaburan hirarki pada tim tersebut. Karena tim percepatan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang dimulai tingkat bawah hingga ke atas, maka dapat dikatakan bahwa anggota tim tersebut sangat banyak sehingga akan mengaburkan hirarki pada tim tersebut.

Pada aspek tidak mengenal adanya hubungan kekerabatan dalam hubungan kerja, agaknya menjadi hal yang sangat umum dilanggar dalam program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Jombang. Fakta ini dapat dilihat dari pemilihan kader stunting di tingkat Posyandu yang mayoritas dipilih berdasarkan kedekatan secara personal dan bukan berdasarkan kompetensi. Hal ini sekaligus menjadi problematika dalam implementasi tipe ideal birokrasi Weber, khususnya pada aspek penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sekaligus adanya pemisahan antara kehidupan pribadi dengan organisasi.

Dalam hal pemilihan kader stunting di tingkat Posyandu, seringkali hanya didasarkan atas hubungan baik dan pertemanan semata. Hal ini menyebabkan faktor pemilihan yang tidak berdasarkan kompetensi tersebut menjadi penghambat dalam

pendataan stunting. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari seringnya kader-kader stunting di tingkat Posyandu tersebut menolak tugas dan kewajiban mengoperasikan aplikasi pendataan stunting yang diperuntukkan bagi mereka dengan berbagai alasan. Beberapa alasan yang mereka kemukakan, antara lain: usia yang sudah tua sehingga merasa tidak mampu mempelajari aplikasi-aplikasi pendataan stunting, gagap teknologi, takut melakukan kesalahan hingga alasan yang paling sederhana yakni malas. Tentunya hal ini akan menghambat proses pendataan stunting maupun sinkronisasi data stunting.

Patologi birokrasi model seperti tersebut di atas agaknya sudah lazim terjadi di Indonesia. Korupsi, kolusi dan nepotisme seolah-olah sudah membudaya dalam birokrasi di Indonesia. Dalam permasalahan sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang ini, agaknya pemilihan kader stunting yang berdasarkan hubungan kedekatan personal dan tidak memiliki kompetensi yang memadai menjadi hal yang sangat lumrah. Hal ini tentunya justru menimbulkan permasalahan baru dalam sinkronisasi data stunting. Kontras dengan hal tersebut, seringkali orang-orang dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai kader stunting justru menolak untuk menjadi kader stunting. Problematika ini menjadikan permasalahan baru yang juga harus segera diselesaikan. Dalam hal ini selain mempersiapkan kader yang kompeten, juga harus meminimalisir adanya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan patologi birokrasi. Permasalahan terkait sinkronisasi data stunting ini akan dapat diminimalisir apabila pemilihan kader stunting berdasarkan kompetensi yang dimiliki bukan sekadar hubungan kekerabatan atau kedekatan secara personal.

Jika dibandingkan dengan tipe birokrasi ideal Weber, sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang agaknya masih jauh dari anggapan ideal tersebut. Berbagai penyimpangan-penyimpangan masih seringkali terjadi dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang. Di mana fenomena yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan birokrasi tersebut lazim disebut patologi birokrasi. Dalam hal sinkronisasi, data stunting di Kabupaten Jombang ini juga seringkali ditemukan patologi birokrasi.

Patologi birokrasi yang terjadi pada sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Holifah, 2023).¹³ Patologi birokrasi yang berfokus pada paternalistik yakni dimana atasan wajib dipatuhi dan dihormati, dalam hal ini penggunaan aplikasi JOSS dalam pendataan stunting dirasa kurang bisa dilaksanakan

¹³ Holifah, N. , I. N. M. , & H. L. N. (2023). Patologi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Tinjauan terhadap Fenomena “Pungli Anggaran Pembangunan.” *Prosiding Nasional FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf*, 1(1), 1–9.

secara maksimal. Ini disebabkan karena aplikasi tersebut sedianya diperuntukkan bagi para kader stunting di Posyandu. Namun kenyataannya, tidak semua kader mau dan mampu mengoperasikan aplikasi pendataan stunting. Dalam hal ini, hendaknya pemerintah setempat mengambil alternatif kebijakan yang lain sehingga pendataan stunting di tingkat Posyandu tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Patologi birokrasi berikutnya menurut Holifah (2023), yakni penggelembungan anggaran.¹⁴ Dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang, dapat diketahui bahwa beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya adalah aplikasi JOSS dan VERVAL. Hal ini tentunya merupakan pemborosan karena setiap aplikasi memiliki anggaran yang berbeda-beda. Sejatinnya dalam rangka menekan anggaran dalam sinkronisasi data stunting ini bisa disiasati dengan memaksimalkan satu aplikasi yang bisa digunakan oleh semua pihak. Selain menghemat anggaran, cara ini juga dapat menjadikan data kuantitatif yang semula beragam menjadi sinkron.

Dalam hal struktur birokrasi yang umumnya terjadi di Indonesia, pada percepatan penurunan stunting juga terjadi hal yang serupa. Percepatan penurunan stunting sebenarnya cukup dengan keterlibatan dinas-dinas terkait saja. Adanya tim yang secara khusus dibentuk untuk percepatan penurunan stunting yang terdiri dari berbagai elemen justru dapat menjadi penyebab terhambatnya sinkronisasi data stunting. Hal ini tidak terlepas dari patologi birokrasi yang berhubungan struktur birokrasi itu sendiri yang mana semakin ramping strukturnya maka akan semakin lincah pergerakannya sehingga efektivitas dan efisiensi yang diharapkan akan dapat tercapai dengan lebih mudah.

Sejatinnya berbagai aplikasi pendataan stunting yang digunakan di Kabupaten Jombang adalah untuk menyederhanakan prosedur pelayanan terkait data stunting. Namun yang terjadi justru sebaliknya, semakin beragam aplikasi yang digunakan, membuat data yang diperoleh menjadi beragam pula. Fakta tersebut menjadikan pendataan stunting menjadi semakin rumit. Selain itu, aplikasi-aplikasi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena berbagai alasan. Hal ini menjadi salah satu penyebab sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang menjadi terhambat. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan untuk menggunakan satu aplikasi yang dapat mencakup semua kebutuhan terkait data stunting dengan prosedur yang sederhana dan mudah diakses seluruh pihak yang membutuhkan.

¹⁴ Ibid

Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi salah satu permasalahan yang umum terjadi dalam pemanfaatan teknologi digital. Meskipun aplikasi dan teknologi sudah sangat canggih namun jika tidak didukung oleh SDM yang siap dan kompeten maka akan menjadi sia-sia. Selain itu, adanya aplikasi digital sejatinya bisa membantu tugas-tugas birokrasi menjadi lebih sederhana. Adanya aplikasi-aplikasi digital ini sebenarnya juga dapat meringankan tugas para birokrat sehingga struktur organisasi bisa menjadi lebih ramping. Namun faktanya, meskipun telah dibantu oleh aplikasi-aplikasi digital, struktur organisasi umumnya tetap saja gemuk. Hal tersebut menunjukkan birokrasi yang semacam itu menjadi tidak efisien.

Dalam sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang, adanya aplikasi-aplikasi pendataan stunting seharusnya bisa memangkas birokrasi utamanya pada aspek struktur. Hal ini karena keberadaan aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan para petugas pendataan stunting atau kader. Artinya, harusnya tidak lagi dibutuhkan struktur organisasi yang gemuk dalam menyelesaikan permasalahan terkait stunting utamanya sinkronisasi data. Struktur birokrasi yang ramping dan sederhana akan membuat organisasi bergerak dengan mudah dan lincah. Jika struktur organisasinya ramping dan sederhana maka tugas yang mampu diselesaikan juga akan semakin banyak. Dengan begitu, organisasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berlaku dalam proses sinkronisasi data stunting apalagi telah dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi digital dalam pendataan stunting.

Patologi birokrasi selanjutnya menurut (Holifah, 2023) yaitu fragmentasi birokrasi. Dalam hal sinkronisasi data stunting khususnya di Kabupaten Jombang, fragmentasi birokrasi ini terlihat dengan jelas. Beberapa OPD yang terkait pendataan stunting memiliki program dan menggunakan aplikasi digital yang berbeda-beda. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab unsynchronous data stunting di kabupaten Jombang. Selain itu, berbagai OPD tersebut memiliki program masing-masing terkait penurunan stunting. Berbagai OPD tersebut memiliki tupoksi dan kewenangan yang serumpun dalam percepatan penurunan stunting. Fakta tersebut tentunya tidak sesuai dengan birokrasi yang memiliki tujuan terciptanya efektivitas dan efisiensi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang diharapkan masyarakat, pemerintah hendaknya melakukan reformasi birokrasi. Jika berbicara dalam konteks sinkronisasi data stunting ini, berbagai alternatif solusi dapat diambil utamanya yang terkait dengan birokrasinya. Misalnya dengan pendataan yang transparan, merampingkan struktur birokrasi, pembagian tugas yang jelas serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan

mengutamakan kepentingan organisasi. Apabila patologi-patologi birokrasi tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan maka bukan mustahil sinkronisasi data stunting akan mudah diwujudkan.

D. KESIMPULAN

Sinkronisasi data stunting menjadi persoalan yang krusial dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang. Masalah sinkronisasi data stunting ini menjadi salah satu penghambat dalam percepatan penurunan stunting. Padahal sinkronisasi data stunting memiliki urgensi karena dapat mencegah terjadinya konflik data. Fenomena sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang pada hakikatnya tidak terlepas dari patologi birokrasi yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Patologi birokrasi yang terjadi dalam permasalahan sinkronisasi data stunting di Kabupaten Jombang dalam rangka percepatan penurunan stunting meliputi berbagai macam hal seperti pembagian tugas yang tidak jelas, fragmentasi birokrasi, serta sumber daya manusia yang kurang kompeten. Jika patologi birokrasi dalam permasalahan tersebut dapat diminimalisir, maka peluang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang akan lebih besar. Hal ini disebabkan karena salah satu hal yang menjadi penghambat sinkronisasi data stunting tersebut yakni patologi birokrasi bukanlah suatu hal yang tidak bisa diselesaikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abay, U. (2024). Gandeng Kementan, Kabupaten Jombang Cegah Stunting Lewat Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Susu.
- gerdupapak.com. (2023, June 16). Pemkab Jombang Melalui BAPPEDA Terus Berinovasi dalam Menekan Angka Stunting|.
- Holifah, N. , I. N. M. , & H. L. N. (2023). Patologi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Tinjauan terhadap Fenomena “Pungli Anggaran Pembangunan.” *Prosiding Nasional FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf*, 1(1), 1–9.
- Indanah, I., Jauhar, M., Kartikasari, F., & Kusumawardani, L. H. (2024). Pelatihan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Keterampilan Deteksi Dini Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.33658/jl.v20i1.341>

- Kominfo.jatimprov.go.id. (2023, November 24). Komitmen Atasi Stunting, Jombang Gelar Jambore 1000 Tim Pendamping Keluarga- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024). Analisis Tipe Ideal Birokrasi Dengan Konsep Birokrasi Weber di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Analisis Tipe Ideal Birokrasi*, 2(4), 82–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11105597>
- Nowo, C. R. H., & Saian, P. O. N. (2024). Evaluasi Kinerja Non-Cryptographic Hash Functions (NCHF) dalam Sinkronisasi Data pada DBMS Oracle dan Postgres. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(4), 1842–1854. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i4.5531>.
- Miles, H. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Prameswari, L. B. (2024). Kepala BKKBN sebut data stunting terbaru masih menunggu sinkronisasi.
- Pratiwi, R. (2021). Dampak Status Gizi Pendek (Stunting) Terhadap Prestasi Belajar. *NURSING UPDATE : Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN : 2085-5931 e-ISSN : 2623-2871, 12(2), 11–23. <https://doi.org/10.36089/nu.v12i2.317>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229.
- stunting.go.id. (2024). TP2S - Tim Percepatan Penurunan Stunting.